

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini perhatian lebih diberikan pada praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya. Terdapat tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas publik pada lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2018:1). Dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi sektor publik, Laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam membangun akuntabilitas tersebut (Mardiasmo, 2018: 199).

Laporan keuangan merupakan salah satu output dari hasil kerja sektor publik. Laporan keuangan tersebut adalah sarana dimana bisnis (dalam hal ini pemerintah) bertanggung jawab kepada masyarakat umum atas kinerja keuangannya. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan berkualitas baik (Farah Fadillah Herindraningrum & Indrawati Yuhertiana, 2021). Selanjutnya Stasya Meily T, dkk (2021) menyatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, suatu laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan, agar laporan keuangan tersebut bisa dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Semakin berkualitasnya suatu laporan keuangan mencerminkan tanggungjawab pemerintah daerah.

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya (Enita Binawati, 2022). Laporan keuangan juga merupakan salah satu informasi penting untuk mengambil keputusan ekonomi, dan sebuah laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk memprediksi yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan menganalisis (Hery, 2021:1).

Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), selain itu penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian intern, bukti yang cukup, dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan secara keseluruhan, yang akan dibahas kemudian dipertimbangkan dalam Pengecekan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Enita Binawati, 2022). Untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan harus disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk dilakukan proses audit dan mendapat penilaian setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, ada empat jenis opini yang diberikan oleh auditor, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar tanpa pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW) dan opini wajar tanpa pengecualian (TW). Opini Tertutup (TMP). Laporan keuangan pemerintah dinyatakan baik apabila memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK-RI. Faktanya, opini WTP masih kurang memberikan bobot terhadap laporan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. (Dito Aditia dan Mika Debora, 2019:2).

Pemerintah dalam menyusun Laporan keuangan haruslah berkualitas dimana harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip dan aturan dalam standar akuntansi yang berlaku, dan laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada SAP keuangan yang telah ditetapkan. (Tri Ikyarti & Nila Aprila, 2019). SAP juga berguna bagi penyusunan laporan keuangan yang disajikan kepada pihak diluar pemerintah dalam menentukan informasi (Nanda Saputri Yanti, dkk, 2020).

Oktriana Arza, dkk (2021) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP memiliki persyaratan yang dapat diberlakukan secara hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. SAP diimplementasikan dalam lingkup pemerintahan yaitu Pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintahan

harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2010, menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Hari Munira, 2022).

Pada kenyataannya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masih terdapat fenomena, seperti yang disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna (2021) mengatakan, terdapat 55 LKPD belum memperoleh opini WTP. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Secara umum, permasalahan penyajian laporan keuangan terjadi antara lain pada akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal. Fenomena lainnya, Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI (2022) mengatakan, masalah temuan Badan Pemeriksaa Keuangan RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar harus diselesaikan dengan tuntas. BPK menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp 107 miliar tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020 pada era Bupati Faida. Pengeluaran sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat

kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), dan belanja bansos (sembako, uang tunai).

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, fenomena lebih lanjut disampaikan oleh BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat pada LHP tahun 2021 tertulis bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan pada Pemerintahan Daerah salahsatunya pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung dinyatakan masih terdapat kekurangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan menurut Dadang Supriatna selaku Bupati Bandung menyampaikan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam laporan keuangan Kabupaten Bandung, khususnya dalam pencatatan aset yang perlu lebih ditingkatkan. Pencatatan aset milik Pemkab Bandung itu sampai sekarang baru 10 persen. Tapi tahun ini saya targetkan 600 bidang aset bisa dibereskan dari total 2.200 bidang.

Oleh karena itu, SAP merupakan salah satu aspek penting dalam menyusun, dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Nanda Saputri Yanti, dkk, 2020).

Selain memahami SAP, penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah juga sangat penting untuk membuat laporan keuangan berkualitas tinggi. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi

merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efisien, dan efisien. Penggunaan sistem informasi Akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi yang sistematis mulai dari tahap pengelompokan, klasifikasi, pencatatan dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan nantinya Keputusan tertentu yang dibuat oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (Lailatur Rohmah, dkk, 2020:44). Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh lembaga eksternal maupun internal. Pada prinsipnya suatu sistem informasi akuntansi dapat dioperasikan tanpa menggunakan komputer, namun untuk menunjang kelancaran sistem tersebut, keterlibatan komputer membantu manusia dalam menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. Sehingga informasi yang digunakan dapat disajikan tepat waktu, cepat dan mudah (Siti Hasanah & Tapi Rumondang Sari Siregar, 2021).

Berkaitan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), disebutkan juga bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mencatat, mengelola dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah

daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah adalah semua informasi terkait keuangan daerah yang diperlukan (Yustinus Lambyombar & Selva Temalagi, 2022). Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah (Siti Hasanah & Tapi Rumondang Sari Siregar, 2021).

Sistem informasi akuntansi pemerintah daerah juga pada kenyataannya saat ini masih terdapat fenomena. Ketua BPK Agung Firman Sampurna (2021) mengatakan, meski memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lembaganya menemukan sejumlah temuan masalah yang bisa berujung pada kerugian negara. Permasalahan itu terdiri dari 28% kelemahan sistem, 29% ketidakpatuhan, dan 43% ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan. Fenomena lebih lanjut disampaikan Nurlailatul (2021) selaku Kasubid Sistem Informasi Akuntansi BKAD Kab. Bandung mengatakan bahwa Kabupaten Bandung mengalami hambatan dan keterbatasan seperti kesalahan dalam proses data entry Pendapatan Pajak Daerah dan SIP PAD yang belum terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, sehingga data pendapatan pajak daerah tidak bisa diperoleh secara real time.

Berdasarkan fenomena Sistem Informasi Akuntansi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar mewujudkan Laporan keuangan yang berkualitas. Seperti yang dikatakan Debby Christin Sihasale, dkk (2018:2)

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan faktor penting untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan SIA merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan, pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah kedalam sebuah laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akurat.

Dalam penelitian sebelumnya yaitu, Diana Puspita, dkk (2020:86), menyatakan dimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian Zainuddin, dkk (2019:44) menyatakan Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Siska Yulia Defitri (2018:74) yang meneliti tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, dan penelitian Dewi Mulyati, dkk (2020:325) juga menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menurut Bertha Bintari Wahyujati (2022:83), adalah proses mengenali masalah yang akan di teliti. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) khususnya pada Penyajian Laporan Keuangan, Akuntansi Aset Tetap, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sehingga menyebabkan kurangnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Masih terdapat kelemahan sistem dan hambatan keterbatasan dalam menjalankan Sistem Informasi Akuntansi sehingga menyebabkan kurangnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3 Rumusan masalah

Menurut Ahmad Aljabar Tanjung & Mulyani (2021:22) Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, pengujian hipotesis dan analisis data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:44) Maksud penelitian adalah pegangan bagi metode dan teknik penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:44) Tujuan penelitian merupakan pegangan bagi pendekatan masalah atau kerangka pemikiran dan hipotesisnya serta kesimpulan akhir penelitian. Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan fenomena terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem

Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta dapat memberikan manfaat positif untuk meningkatkan Kualitas Lapoaran Keuangan pada masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai mengembangkan ilmu akuntansi khususnya pada bidang sektor publik bagi peneliti ataupun pembaca.